

EFEKTIVITAS STRATEGI KEBIJAKAN PENANGANAN ANAK PUTUS SEKOLAH DI KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA

Jefri Adi Sanjaya

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas
Airlangga

Abstract

The Effectiveness of Development Policy and Strategy is a Local Government Agencies' continuity success in terms of Development Policy and Strategy. The object of this research is school dropout's handling. The objective of the study is to explain the Effectiveness of Development policy which is conducted by Surabaya Governmental in terms of school dropouts' handling. This study using qualitative descriptive method to develop the research. The writer chooses some areas in Kenjeran which are; Tambak Wedi, Bulak Banteng, Tanah Kali Kedinding, and Sidotopo Wetan which become the scope and limitation of this study. The method of informant determination which is chosen by the writer is Purposive sampling while documentation, interview and observation are the method of collecting data. The data validity is checked by triangulation and the data analysis method in this study using data reduction, data presentation and the last, this study terminates with the conclusion.

The result of the study indicates that Surabaya Governmental's policy and strategy which is conducted by using the combination of the expansion strategy and transformation have worked effectively. This strategy is aimed at improving the status, capacity, and tools that can give positive changes in the future organization. This strategy is combined with the need of organizations to meet internal and external emphases which are principally done for the occurrence of a fundamental change. BOPDA and resident partner registration are the expansion strategy which possibly applied by the Government in order to prevent the school dropouts. Non formal education such as PKBM which is integrated with CSR program by Surabaya Governmental Social Service can be used in terms of Transformation Strategy.

Keywords: *Policy strategy, School dropout*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang sangat penting di era globalisasi dan modernitas yang tak terbendung saat ini. Banyak orang yang rela berkorban apa pun demi memperoleh level pendidikan tertinggi. Bahkan keluarga pun jadi taruhannya. Sehingga, tak heran jika pendidikan sering dikaitkan dengan status sosial seseorang. Di mana seseorang yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi akan diutamakan serta dihormati dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu pendidikan juga memberikan banyak pengetahuan dan informasi mengenai berbagai fenomena baru yang jarang didiskusikan di lingkungan masyarakat. Mulai dari hal-hal kecil seperti hubungan antarindividu sampai dengan hubungan multilateral antar berbagai negara. Dari hal tersebut sudah mencerminkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia.

Dalam ranah pemerintah pusat maupun daerah sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31, ayat: 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Akan tetapi, di era modern saat ini tak sedikit pula orang yang masih buta aksara, berpendidikan rendah, ditambah lagi dengan faktor tingginya anak putus sekolah di berbagai daerah serta dibarengi dengan rendahnya minat anak dan juga orang tua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga, hal ini masih menjadi pembicaraan yang menimbulkan polemik bahwa pihak pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab atas kondisi tersebut. Walaupun sebenarnya hal ini bukan hanya

tanggung jawab pemerintah saja tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat.

Mengutip survei UReporters di *fanspage* UNICEF Indonesia, dari beberapa alasan anak Indonesia terpaksa menggantungkan seragamnya dan berhenti sekolah, 52 persen diantaranya karena ketidakmampuan membayar biaya sekolah. Data ini jadi alasan yang paling dominan. Selain karena bekerja (16 persen), menikah (14 persen), jarak dari rumah ke sekolah terlalu jauh (5 persen), dan kurikulum pelajaran tidak menarik (6 persen). Di luar alasan ini, UReporters juga menyuguhkan kemungkinan alasan lain sebesar 7 persen.

1. Tabel I.1. Persentase Jumlah Penduduk Usia Sekolah, Bersekolah Dan Tidak/Belum Sekolah di Indonesia, Tahun 2016

Kelompok Umur Sekolah	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
7-12	0,87	98,92	0,21
13-15	0,67	94,44	4,89
16-18	0,77	70,31	28,93
19-24	0,93	22,82	76,24
7-24	0,84	71,2	27,97

Sumber : Badan Pusat Statistik.

Dari data pada tabel 1.1 dapat dideskripsikan bahwa pada tahun 2016, persentase anak yang tidak sekolah lagi untuk kategori umur 7-12 tahun (SD/MI) adalah sebesar 0,21%. Kemudian untuk kategori umur 13-15 tahun (SMP/MTs) sebesar 4,89%, sedangkan untuk kategori umur 16-18 Tahun (SMA/MA) sebesar 28,93%. Dan untuk kategori umur 19-24 tahun (Perguruan Tinggi) sebesar 76,24%. Dari hasil ini menunjukkan angka rawan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang sekolah lebih lanjut adalah di tingkat sekolah SMA sampai Perguruan Tinggi. Melanjutkan hasil dari BPS, Berdasarkan UNICEF, Indonesia telah mengalami kemajuan yang sangat besar dalam memastikan anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar mendapatkan pendidikan, sekitar 97 persen dari anak-anak berusia 7 sampai 12 tahun di seluruh negeri dapat bersekolah. Namun, sebanyak 2,5 juta anak Indonesia yang seharusnya bersekolah tidak dapat menikmati pendidikan: 600.000 anak usia sekolah dasar dan 1.9 juta anak usia sekolah menengah pertama (13-15 tahun)

Surabaya merupakan salah satu kota besar dan modern, namun hal itu tidak berpengaruh terhadap angka partisipasi sekolah. Jumlah anak putus sekolah di Surabaya masih cukup tinggi dan terjadi di hampir seluruh jenjang pendidikan.

2. Tabel I.2. Angka Partisipasi Sekolah Kota di Jawa Timur Tahun 2016

Kota	Usia 7-12 Thn		Usia 13-15 Thn	
	2015	2016	2015	2016
Kediri	99,38	99,86	100,00	92,63
Blitar	99,22	96,79	96,91	93,79
Malang	99,55	98,76	92,52	96,32
Probolinggo	98,03	95,28	93,31	98,73
Pasuruan	99,38	100,00	94,18	96,42
Mojokerto	99,38	99,65	95,97	97,33
Madiun	100,00	100,00	95,65	100,00
Surabaya	98,95	99,10	95,48	97,69

Sumber : bps.go.id

Dari data pada tabel 1.2 dapat dideskripsikan bahwa pada tahun 2015 sampai 2016, persentase angka partisipasi sekolah di Kota Surabaya masih cenderung rendah apabila dibandingkan dengan angka partisipasi sekolah di kota lain di Jawa Timur. Melihat perkembangan angka putus sekolah di kota Surabaya masih cenderung tinggi, maka pemerintah pusat maupun pemerintah kota Surabaya harus segera mengambil kebijakan dan juga tindakan agar tidak semakin bertambah jumlah tersebut.

Salah satu program yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya adalah Program wajib belajar (wajar) 12 tahun yang diterapkan Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya. Namun program ini belum berjalan optimal. Fakta ini terangkum dalam data yang menyebut, angka anak putus sekolah di Surabaya mencapai 6 ribu jiwa. Berdasar sumber yang dikumpulkan, terungkap jika Surabaya masuk kategori kota terbaik untuk pelaksanaan wajar 12 tahun. Apabila ditilik dari program yang ada, fakta ribuan anak putus sekolah tersebut sangat tidak sepadan dengan sukses wajar 12 tahun di Surabaya. Namun, masih terdapat kesulitan dalam pendataan siswa yang putus sekolah yang teridentifikasi dari berbagai jenjang pendidikan tersebut.

3. Tabel I.3. Jumlah Anak Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2013-2016 di Surabaya

Tahun	SD/MI	Jenjang SMP/MTs	SMA/MA	JUMLAH
2013	119 anak	61 anak	21 anak	201 anak
2014	113 anak	56 anak	34 anak	203 anak
2015	124 anak	52 anak	39 anak	215 anak
2016	137 anak	65 anak	29 anak	231 anak

Berdasarkan data Dinas Sosial Surabaya, pada tahun 2014 ada 203 anak putus sekolah di Surabaya, 113 anak usia Sekolah Dasar, 56 anak usia SMP dan 34 anak usia SMA. Sementara untuk kecamatan di Surabaya yang paling banyak jumlah angka putus sekolahnya berada di Kecamatan Semampir dan Kenjeran. Jumlah ini belum termasuk 22 anak terancam putus sekolah, anak jalanan tiga orang, anak nakal empat orang dan anak telantar empat orang. Dalam menangani anak putus sekolah dan anak-anak jalanan, anak nakal dan anak terancam putus sekolah diadakannya program *Campus Social Responsibility* (CSR). Program ini merupakan upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk mewujudkan harapan tidak ada lagi anak yang putus sekolah di Kota Pahlawan. Terobosan ini adalah program pendampingan bagi anak putus sekolah dan rentan putus sekolah dengan melibatkan mahasiswa berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Inspirasi itu muncul dari Kepala Dinsos Kota Surabaya, yaitu Bapak Supomo. Idenya berasal dari pengalamannya sewaktu menjadi Camat Kenjeran. Namun sewaktu masih menjadi Camat Kenjeran, yang sudah menjalankan program ini dan berhasil mengembalikan anak-anak ke sekolah, tetapi faktanya setelah tiga minggu, tiga bulan jalan, anak-anak banyak yang berhenti dan tidak melanjutkan.

Sedangkan di tahun 2016 jumlah anak putus sekolah mengalami peningkatan yaitu 231 jiwa. Dengan rincian 137 anak di tingkat SD/MI, 65 anak pada jenjang SMP/MTs, dan 35 anak tingkat SMA/MA. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang telah diterapkan masih perlu ditinjau lebih lanjut lagi.

Banyak persoalan sosial yang memaksa anak-anak untuk enggan kembali bersekolah, semisal keadaan ekonomi keluarga, lingkungan bahkan banyak juga yang berasal dari *broken home* atau kurang mendapatkan perhatian karena orang tua sibuk bekerja. Dari fakta ini, memperlihatkan bahwa kecamatan Kenjeran masih dan perlu diperhatikan mengenai anak putus sekolah, karena program yang diberikan oleh mantan Camat Kenjeran melalui program CSR. Selain itu Kecamatan Kenjeran menjadi daerah pendatang tertinggi dengan jumlah 5.192 orang. Hal ini berkaitan erat dengan dampak pembangunan Jembatan Suramadu. Dengan adanya akses penghubung jalan antara Pulau Madura dengan Kota Surabaya yang jauh lebih mudah, tak jarang penduduk Madura berduyun-duyun pindah dan menetap di daerah pinggiran Kota Surabaya.

Perlu diingat bahwa Kelangsungan hidup bangsa ke depan berada di tangan anak-anak di masa sekarang. Jika menginginkan kesenangan di masa yang akan datang maka anak juga memperoleh haknya di masa sekarang. Sebagai perwujudan rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa. Anak merupakan

bagian dari generasi muda, penerus cita-cita, dan perjuangan bangsa. Di samping itu, anak merupakan sumber daya manusia yang perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan dari berbagai ancaman dan gangguan agar supaya hak-haknya tidak terabaikan. Selain itu juga hak anak-anak dalam memperoleh pendidikan juga diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 31.

Strategi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani anak putus sekolah berupa kombinasi antara strategi ekspansi dan transformasi. Strategi yang menggabungkan aspek dan fokus pada status, kapasitas, sarana dan masa depan organisasi serta untuk memenuhi tekanan-tekanan yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi tersebut.

Berdasarkan pada hasil data temuan temuan yang ada, Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam melakukan proses strategi kebijakan secara umum lebih mengarah kepada kombinasi strategi ekspansi dan transformasi. Dimana strategi ini memang ditujukan bagi peningkatan status, kapasitas, serta sarana-sarana. Dari segi ekspansi ditandai dengan adanya beberapa kebijakan yang digunakan merupakan kebijakan preventif atau pencegahan anak agar tidak sampai putus sekolah. Pemerintah Kota Surabaya membuat kebijakan seperti Beasiswa BOPDA, jalur masuk Mitra Warga merupakan contoh bahwa pemerintah telah mengupayakan sedemikian rupa sehingga anak-anak putus sekolah di Surabaya menjadi semakin berkurang dari tahun ke tahun. Dari segi strategi transformasi, dapat dilihat dari adanya tuntutan dari pihak internal, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Surabaya yang diwakili oleh Dinas Pendidikan dalam rangka mewujudkan visinya untuk menjadi barometer pendidikan nasional maka sudah menjadi hal yang wajar apabila mereka melakukan berbagai upaya untuk mencegah anak-anak agar tidak putus sekolah. Selain itu, dari segi tekanan eksternal, dengan melihat adanya tuntutan perkembangan zaman dan partisipasi aktif dari masyarakat, maka Dinas Pendidikan masih memberikan fasilitas berupa program nonformal seperti PKBM, Kejar Paket untuk anggota masyarakat yang membutuhkan adanya keterampilan dasar dalam menjalani kehidupannya.

4. **Tabel I.4. Pendidikan Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin (dalam jiwa) di Kecamatan Kenjeran Tahun 2016**

JENJANG PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	L	P	
Belum tamat SD	16.401	16.505	32.906
Tamat SD	23.331	24.825	48.156
Tamat SMP	12.840	11.273	24.113
Tamat SMA	20.047	18.812	38.859
Akademi	813	718	1.531
Strata I	3.190	2.988	6.178
Strata II	112	73	185
Strata III	4	1	5

Sumber: BPS Surabaya

Pada aspek pendidikan yang ada di Kecamatan Kenjeran bisa dilihat dari banyaknya sekolah, banyaknya guru beserta murid dan lainnya. Jumlah sekolah yang paling banyak di Kecamatan Kenjeran adalah TK yaitu 50 sekolah, sedangkan paling sedikit jumlah sekolahnya adalah Madrasah Tsanawiyah hanya 1 sekolah. Untuk jumlah rombongan belajar yang paling banyak di Kecamatan Kenjeran adalah siswa SD yaitu 271 rombongan belajar dan jumlah rombongan paling sedikit yaitu Madrasah Tsanawiyah yaitu 3 rombongan belajar. Jumlah ruang kelas yang paling banyak adalah SLTP sebanyak 144 ruang kelas dan jumlah ruangan kelas yang paling sedikit adalah Madrasah Tsanawiyah sebanyak 3 kelas. Berikut tabel banyaknya sekolah, rombongan belajar dan ruang kelas di Kecamatan Kenjeran:

5. **Tabel I.5. Banyaknya Sekolah, Rombongan Belajar dan Ruang Kelas di Kecamatan Kenjeran Tahun 2016**

JENIS SEKOLAH	JUMLAH SEKOLAH	JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR	JUMLAH RUANG KELAS
TK	50	145	96
SD	23	272	138
Ibtida'iyah	16	111	93
SMP	11	181	144
Tsanawiyah	1	3	3
SMA	3	41	42
SMK	2	9	9

Selain jumlah sekolah, jumlah guru juga di data oleh BPS Surabaya. Guru laki-laki yang paling banyak di Kecamatan Kenjeran adalah guru SLTP sebanyak 162 orang, sedangkan jumlah guru laki-laki paling sedikit adalah guru TK sebanyak 4 orang. Untuk guru perempuan yang paling banyak di Kecamatan Kenjeran adalah guru SD sebanyak 273 orang, sedangkan jumlah guru perempuan paling sedikit adalah pada tingkat Madrasah Tsanawiyah sebanyak 7 orang. Berikut tabel jumlah guru menurut jenis kelamin di Kecamatan Kenjeran:¹

6. **Tabel I.6. Jumlah Guru Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kenjeran Tahun 2016**

JENIS SEKOLAH	JENIS KELAMIN	T	S	Ibtida'iyah	SMP	Tsanawiyah	SMA	SMK
		K	D		P		A	K
	L	4	127	67	162	13	69	21
	P	178	273	106	244	106	127	27
JUMLAH		182	400	173	406	136	196	48

Sumber: BPS Surabaya

Lebih lanjut di Kecamatan Kenjeran juga di data siswa yang menjadi lulusan SMA. Menurut BPS Surabaya bahwa di Kecamatan Kenjeran hanya Kelurahan Bulak Banteng dan Tambak Wedi yang tidak memiliki lulusan SMA. Lulusan Siswa SMA laki-laki paling banyak di Kelurahan Tanah Kali Kedinding yaitu 161 orang dan yang paling sedikit di Kelurahan Sidotopo Wetan yaitu 119 orang, sedangkan lulusan siswa SMA perempuan di Kecamatan Kenjeran paling banyak di Kelurahan Tanah Kali Kedinding yaitu 182 orang dan jumlah lulusan SMA perempuan yang paling sedikit di Kelurahan Sidotopo Wetan yaitu 134 orang.

Dari fenomena yang telah dijelaskan diatas, maka diperlukan suatu analisis untuk mengetahui tingkat efektivitas strategi dalam menangani anak putus sekolah. Dengan demikian, penulis ingin melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Strategi Kebijakan Penanganan Anak Putus Sekolah di Kecamatan Kenjeran.

¹ *ibid.* Hal. 22

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan tipe penelitian deskriptif dengan strategi studi kasus dengan teknik penentuan informan secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumen. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui Advokasi

Dinas pendidikan berusaha memberikan pencegahan agar anak usia sekolah tidak sampai menjadi anak putus sekolah. Dalam hal ini, maka Dinas Pendidikan Kota Surabaya melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat umum untuk memberikan advokasi atau pengawasan terhadap anak-anak usia sekolah yang ada di lingkungannya dengan mendata mereka. Kemudian memberikan laporan kepada Ketua RT, RW, Lurah atau Kecamatan bahwa anak tersebut terancam putus sekolah, sehingga akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Program ini bernama Mitra Warga. Aspek utama yang menjadi pertimbangan dari program ini adalah yang paling dekat dan berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Selain melibatkan anggota masyarakat, Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga telah melibatkan anak-anak sekolah untuk menjadi konselor bagi teman sebayanya. Seperti yang telah diketahui bersama, masa-masa sekolah sangat rentan akan masalah yang menimpa siswa. Biasanya mereka tidak mau menyampaikan hal tersebut ke orang terdekat atau keluarga. Mereka lebih mempercayai teman sebayanya. Sehingga dengan menjadi konselor, maka siswa tidak sampai larut dalam masalah hingga memutuskan untuk berhenti sekolah, karena mendapatkan tempat yang tepat untuk mengatasi permasalahannya. Program ini bernama Konselor Sebaya.

Keterlibatan LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal ini sebagai pendamping di setiap wilayah yang memiliki konselor sebaya yang tersebar di seluruh sekolah yang ada di Surabaya. Selain itu, banyak LSM yang juga melakukan inisiatif untuk memfasilitasi warga masyarakat yang membutuhkan advokasi agar mendapatkan akses pendidikan yang sesuai dengan menerima aduan, informasi dan data yang ada di lapangan. Untuk selanjutnya LSM ini akan meneruskan informasi tersebut ke Dinas Pendidikan, dan akan di tindak lanjuti. LSM yang terlibat antara lain Budi Utama, Genta, Latansa, dll.

Alternatif lain yang memfasilitasi penyampaian informasi ke Dinas Pendidikan adalah melalui OutReach.

Informasi ini berasal dari warga masyarakat yang memberikan informasi kepada Bapemas atau Badan Pemberdayaan Masyarakat. Semua informasi yang diterima oleh Bapemas untuk selanjutnya akan diteruskan ke Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti lebih jauh lagi.

Melalui Pemberian Bantuan Dana

Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan anggaran dana untuk bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa yang diberikan kepada siswa sekolah dari semua jenjang pendidikan. Jadi selain mendapatkan beasiswa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari pemerintah pusat, siswa sekolah juga mendapatkan beasiswa Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) dari Pemerintah Kota Surabaya. BOPDA diberikan kepada anak sekolah yang memiliki Kartu Keluarga atau Nomor Induk Kependudukan Surabaya, sehingga untuk anak-anak yang berasal dari luar daerah tidak bisa melakukan akses atas fasilitas ini.

Selain bantuan dana berupa BOPDA, Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan juga memberikan bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu di setiap jenjang sekolah, baik yang bersekolah formal ataupun yang non formal (kejar paket) dan berprestasi. Tambahan, para siswa yang tidak memiliki biaya untuk mendapatkan fasilitas fungsional, maka pemerintah juga memberikan bantuan berupa pemberian alat-alat sekolah di awal masuk sekolah.

Melalui Program Non Formal

Pemerintah Kota Surabaya, masih memberikan fasilitas kepada warga masyarakat yang memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Akan tetapi sering kali kesadaran untuk kembali belajar tersebut tidak sejalan dengan perkembangan usia. Sehingga mereka tidak bisa masuk ke sekolah formal. Maka dari itu pemerintah memberikan fasilitas kejar paket A, B, C atau setara dengan tingkat SD, SMP atau pun SMA.

Selain itu, pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. PKBM ini diberikan kepada mereka yang memang masih memiliki semangat belajar, akan tetapi usianya sudah tidak masuk dalam kategori usia sekolah, sehingga diberikan fasilitas khusus. Dari PKBM ini para siswanya bisa ikut serta dalam ujian nasional melalui sistem kejar paket.

Pemerintah Kota Surabaya dalam intensitas dua kali dalam satu bulan mengadakan bakti sosial terintegrasi yang melibatkan setiap anggota SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kota Surabaya, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan itu sendiri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan lain-lain. Agenda tersebut diadakan di daerah yang masih membutuhkan penanganan dan belum bisa mengakses

fasilitas yang memadai saat harus datang langsung ke dinas terkait.

Jadi apabila ada warga yang sedang membutuhkan untuk mengurus KTP, KK, ataupun NIK Surabaya bisa datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Untuk Dinas Pendidikan sendiri biasanya menerima laporan dan informasi dari warga tentang anak yang putus sekolah dan sedang membutuhkan fasilitas advokasi agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak.

Selain dari hasil wawancara, ada beberapa fakta yang di dapat dari data yang telah di dapat dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Pada tahun 2015, ada sekitar 280 data siswa yang akan putus sekolah maupun yang sudah putus sekolah. Data ini berasal dari berbagai macam pihak yang melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya agar anak-anak tersebut dapat melanjutkan sekolahnya.

Akan tetapi, dari 280 data yang masuk, sejumlah 67 anak dengan jelas menolak untuk melanjutkan sekolah baik di sekolah formal maupun non formal. Alasan yang mendominasi karena sudah bekerja, tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah, dan karena hamil. Sedangkan 213 masih dalam proses penanganan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

Dari jumlah 213 siswa tersebut baru sekitar 72 anak yang sudah jelas statusnya. Mereka telah mendapatkan penanganan dari Dinas Pendidikan berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing. Sedangkan 141 data siswa yang terancam putus sekolah atau telah berhenti sekolah belum mendapatkan kejelasan maupun tindak lanjut.

Untuk rinciannya, dari 72 yang telah tertangani, 11 siswa telah kembali masuk ke sekolah formal. Sedangkan yang masuk ke Kejar Paket juga berjumlah 7 orang. Untuk yang masuk ke PKBM ada sekitar 14 orang. Dan ada 4 anak yang tetap tidak mau melanjutkan sekolah.

Dinas Pendidikan dalam hal ini masih memiliki kelemahan dalam melakukan *follow up* atau menindaklanjuti tentang data-data yang telah diterima dari berbagai pihak. Apalagi setiap tahun jumlah dan data dari lapangan akan terus mengalami perubahan dan perkembangan. Untuk itu upaya untuk menangani seharusnya dilakukan secara tanggap dan tepat.

Melalui Program CSR (Campus Social Responsibility)

Sejak tahun 2017 semakin banyak kepala sekolah yang memasukkan siswanya ke daftar anak rawan putus sekolah. Hal ini disebabkan karena bidang pendidikan yang semula dikelola pemerintah daerah kabupaten/kota diambil alih oleh pemerintah provinsi, sehingga pendidikan pada jenjang SMA/SMK tidak gratis

lagi. Maka dengan otomatis semakin banyak pula adik asuh yang harus diakomodasi dengan program CSR.

Program CSR tidak sembarangan memilih kakak pendamping untuk anak-anak yang kurang beruntung tersebut. Selain harus serius mendedikasikan waktunya dan patuh pada aturan program, mereka wajib memiliki kemampuan personal untuk melakukan pendampingan. Dan nantinya akan dilakukan tes kepribadian serta wawancara khusus.

SIMPULAN

Sebuah strategi kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan oleh organisasi membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak, baik lembaga pemerintah, swasta hingga masyarakat umum. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya, yang dimaksudkan adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya telah membuat beberapa cara untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi kebijakan pemerintah kota Surabaya yang dilakukan dengan menggunakan kombinasi strategi ekspansi dan transformasi sudah cukup efektif. Dimana strategi ini memang ditujukan bagi peningkatan status, kapasitas, serta sarana-sarana yang berdampak mampu memberi sentuhan warna masa depan keorganisasian yang selaras zaman.

Dikombinasikan dengan adanya kebutuhan dari organisasi untuk memenuhi tekanan internal dan eksternal yang pada prinsipnya dilakukan demi terjadinya perubahan fundamental. Strategi ekspansi berupa kebijakan preventif atau pencegahan anak agar tidak sampai putus sekolah seperti Beasiswa BOPDA, jalur masuk Mitra Warga. Untuk strategi transformasi memberikan fasilitas program non formal seperti PKBM, Kejar Paket, dan berintegrasi dengan Program CSR dari Dinas Sosial Kota Surabaya.

Dinas pendidikan berusaha memberikan pencegahan agar anak usia sekolah tidak sampai menjadi anak putus sekolah. Dalam hal ini, maka Dinas Pendidikan Kota Surabaya melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat umum untuk memberikan advokasi atau pengawalan terhadap anak-anak usia sekolah yang ada di lingkungannya dengan mendata mereka. Kemudian memberikan laporan kepada Ketua RT, RW, Lurah atau Kecamatan bahwa anak tersebut terancam putus sekolah, sehingga akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Program ini bernama Mitra Warga. Aspek utama yang menjadi pertimbangan dari program ini adalah yang paling dekat dan berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Selain melibatkan anggota masyarakat, Dinas Pendidikan Kota Surabaya juga telah melibatkan anak-anak sekolah untuk menjadi konselor bagi teman sebayanya. Seperti yang telah diketahui bersama, masa masa sekolah sangat rentan akan masalah yang menimpa siswa. Biasanya mereka tidak mau menyampaikan hal tersebut ke orang terdekat atau keluarga. Mereka lebih mempercayai teman sebayanya. Sehingga dengan menjadi konselor, maka siswa tidak sampai larut dalam

masalah hingga memutuskan untuk berhenti sekolah, karena mendapatkan tempat yang tepat untuk mengatasi permasalahannya. Program ini bernama Konselor Sebaya.

Keterlibatan LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal ini sebagai pendamping di setiap wilayah yang memiliki konselor sebaya yang tersebar di seluruh sekolah yang ada di Surabaya. Selain itu, banyak LSM yang juga melakukan inisiatif untuk memfasilitasi warga masyarakat yang membutuhkan advokasi agar mendapatkan akses pendidikan yang sesuai dengan menerima aduan, informasi dan data yang ada di lapangan.

Untuk selanjutnya LSM ini akan meneruskan informasi tersebut ke Dinas Pendidikan, dan akan di tindak lanjuti. LSM yang terlibat antara lain Budi Utama, Genta, Latansa, dll. Alternatif lain yang memfasilitasi penyampaian informasi ke Dinas Pendidikan adalah melalui *Out Reach*. Informasi ini berasal dari warga masyarakat yang memberikan informasi kepada Bapemas atau Badan Pemberdayaan Masyarakat. Semua informasi yang diterima oleh Bapemas untuk selanjutnya akan diteruskan ke Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti lebih jauh lagi.

Pemerintah Kota Surabaya telah memberikan anggaran dana untuk bidang pendidikan melalui pemberian beasiswa yang diberikan kepada siswa sekolah dari semua jenjang pendidikan. Jadi selain mendapatkan beasiswa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berasal dari pemerintah pusat, siswa sekolah juga mendapatkan beasiswa Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) dari Pemerintah Kota Surabaya. BOPDA diberikan kepada anak sekolah yang memiliki Kartu Keluarga atau Nomor Induk Kependudukan Surabaya, sehingga untuk anak anak yang berasal dari luar daerah tidak bisa melakukan akses atas fasilitas ini.

Selain bantuan dana berupa BOPDA, Pemerintah Kota Surabaya, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan juga memberikan bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu di setiap jenjang sekolah, baik yang bersekolah formal ataupun yang non formal (kejar paket) dan berprestasi. Tambahan, para siswa yang tidak memiliki biaya untuk mendapatkan fasilitas fungsional, maka pemerintah juga memberikan bantuan berupa pemberian alat alat sekolah di awal masuk sekolah.

Dari segi strategi transformasi, dapat dilihat dari adanya tuntutan dari pihak internal, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Surabaya yang diwakili oleh Dinas Pendidikan dalam rangka mewujudkan visinya untuk menjadi barometer pendidikan nasional maka sudah menjadi hal yang wajar apabila mereka melakukan berbagai upaya untuk mencegah anak anak agar tidak putus sekolah.

Selain itu, dari segi tekanan eksternal, dengan melihat adanya tuntutan perkembangan zaman dan partisipasi aktif dari masyarakat, maka Dinas Pendidikan masih memberikan fasilitas berupa program non formal seperti PKBM, Kejar Paket untuk anggota masyarakat yang membutuhkan adanya keterampilan dasar dalam

menjalani kehidupannya. Melalui Program Non Formal, Pemerintah Kota Surabaya masih memberikan fasilitas kepada warga masyarakat yang memiliki semangat yang tinggi untuk belajar. Akan tetapi sering kali kesadaran untuk kembali belajar tersebut tidak sejalan dengan perkembangan usia.

Sehingga mereka tidak bisa masuk ke sekolah formal. Maka dari itu pemerintah memberikan fasilitas kejar paket A, B, C atau setara dengan tingkat SD, SMP atau pun SMA. Selain itu, pemerintah Kota Surabaya juga memiliki program PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. PKBM ini diberikan kepada mereka yang memang masih memiliki semangat belajar, akan tetapi usianya sudah tidak masuk dalam kategori usia sekolah, sehingga diberikan fasilitas khusus. Dari PKBM ini para siswanya bisa ikut serta dalam ujian nasional melalui sistem kejar paket.

Secara perlahan jumlah anak putus sekolah mengalami penurunan sejak diterapkannya kebijakan penanganan anak putus sekolah. Sekitar 135 anak dari total 235 anak putus sekolah, sudah bisa bersekolah kembali tanpa harus mengeluarkan biaya apa pun.

Masyarakat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Surabaya dalam hal penanganan anak putus sekolah. Hal ini dapat tercermin dari upaya-upaya LSM yang juga ikut serta berperan menampung anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Di Kota Surabaya dewasa ini telah bermunculan berbagai lembaga sosial dengan identitas pendidikan seperti, Taman Bacaan Masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), LSM Pendidikan, dan lembaga sosial lainnya. Sehingga terjadi integrasi antara pemerintah dan masyarakat yang turut serta berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan mengentaskan anak-anak yang mengalami putus sekolah ataupun membantu siswa yang terancam dikeluarkan oleh pihak sekolah.

Pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pendidikan berupaya untuk lebih giat lagi dalam melakukan pendataan mengenai anak putus sekolah, dan kemudian mengupayakan secara maksimal agar siswa yang bersangkutan dapat bersekolah kembali, serta dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aimee, Henne, dkk. 2010. *Manajemen Strategik Keorganisasian Publik*. Bandung : PT Refika Aditama
- Al fatih, 2010. *Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Kajian Aspek Kebijakan Pembiayaan)*. Jurnal Pendidikan Matematika. Universitas Sriwijaya
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: KENCANA, Prenada Media Group
- Djumhur, I dan Surya, Muhammad. 1975. *Bimbingan Dan Penyuluhan Sekolah*. CV Ilmu. Bandung

- Dwidjowijoto, R. N. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Etzioni. 1985. *Organisasi-organisasi Modern*. Jakarta: UI Press
- Gobel, E. Z., & Koton, Y. P. 2016. *Pengelolaan Danau Limboto Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Deepublish
- Gunawan, Ary H. 2010. *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Handayangingrat. 1995. *Asaz-asaz Organisasi Manajemen*. Jakarta: Cv Mas Agung
- Keban, T. Yerimias. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Kettner, Peter M.; Moroney, Robert M.; Martin, Lawrence L. 2007. *Designing and Managing Programs: An Effectiveness-Based Approach*. (3rded). Newbury Park: Sage Publications
- Krech, D. Cruthfied, R. & Ballachey, E. 1962. *Individual and Society*. Kogakusha: Mc Graw Hill
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi Dan Administrasi*. Jakarta : Penerbit Salemba Humanika
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Murniawati. 2015. *Strategi Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam Menangani Anak Putus Sekolah*. Surabaya: Skripsi UNAIR
- Mustapadidjaja, Bintoro Tjokroamidjojo. 1988. *Kebijaksanaan dan Admnistrasi Pembangunan, Perkembangan, Teori, dan Penerapan*. Jakarta: LP3ES
- Pasolong, Harbani. 2007 *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Patton, Michael Quinn. 2006, *Metode Evaluasi Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Robbins, Stephen P. 1996. *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam.
- Semiawan, P. D. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grafindo
- Siagian, P. Sondang. 2005. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. 2000. *Manajemen Strategik*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Solihin, Ismail. 2012. *Manajemen Strategik*. Bandung : Penerbit Erlangga
- Supriyono. 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT. Grasindo
- Tjiptono, Fandy. 2008. *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta : CV ANDI OFFSET
- Winarno, B. 2007. *Kebijakan Publik: Teori&Prose*. Jakarta: PT. Buku Kita
- Surabaya dalam Angka 2014
- Surabaya dalam Angka 2015
- Surabaya dalam Angka 2016
- Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia
- UU No. 20 Tahun 2003, tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- www.antarajatim.com
- www.bappeda.jatimprov.go.id
- www.bps.go.id
- www.dinsos.jogjaprovo.go.id/jenis-jenis-pmks/
- www.epaper.republika.co.id
- www.fahdisjro.com/2014/09/permasalahan-sosial.html
- www.jpnn.com
- www.jurnalindonesia.net
- www.kominfo.jatimprov.go.id
- www.KomunitasDebatSospolIndonesia/posts/355187207942116
- www.news.detik.com
- www.surabaya.tribunnews.com
- www.unicef.org
- www.wikipedia.org
- BPS Surabaya. *Kecamatan Kenjeran Dalam Angka 2016*